

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah positivisme. Dimana positivisme berarti, ilmu pengetahuan yang harus terlihat nyata, tidak abstrak dan diarahkan untuk mencapai kemajuan, difokuskan untuk menuju fakta-fakta dengan bersandar pada pengetahuan nyata dan pandangan-pandangan ilmiah. Dalam perencanaan, pandangan positivisme mempengaruhi agar perencanaan terfokus pada objek nyata dengan pendekatan ilmu teknis dan sosial. Rencana harus jelas dan mudah diimplementasikan tanpa ada perubahan dalam implementasinya.

Konsep dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun yang semula berada di pusat Kota Madiun yang kemudian dipindahkan ke SSWP 1 yaitu Ibukota Kecamatan Mejayan. Dari faktor yang berpengaruh tersebut kemudian dijadikan tolok ukur untuk melihat adanya peluang kesiapan SSWP lainnya yaitu SSWP 2 Ibukota Kecamatan Jiwan, SSWP 3 Ibukota Kecamatan Dolopo dan SSWP 4 Ibukota Kecamatan Wungu sebagai Ibukota Kabupaten Madiun dibandingkan dengan Kecamatan Mejayan.

3.1.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi *Ex-Post*, dimana penelitian dilakukan pada saat telah dilakukan pelaksanaan perencanaan atau pasca pelaksanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun diidentifikasi dengan pendekatan kuantitatif yang dideskripsikan dan nilai masing-masing faktornya berdasarkan kondisi lapangan dan teori terkait.

3.2. Variabel Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti ingin mengetahui dua permasalahan yaitu faktor-faktor pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dan nilai dari faktor terpilih terhadap pusat-pusat aktifitas SSWP sebagai implikasi kesiapan serta kelayakan sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Madiun. Asumsi yang digunakan dalam

pengambilan variabel adalah asumsi postulat, dimana dalam asumsi postulat menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa membuktikannya.

Variabel ditentukan dari sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2012, sedangkan untuk sub variabel merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, dikarenakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2012 belum dijelaskan mengenai indikator indikator yang harus dipenuhi dalam penentuan ibukota kabupaten. Berdasarkan teori dan beberapa pandangan dari hasil studi yang pernah dilakukan, maka ditetapkan variabel yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian adalah;



Tabel 3. 1 Variabel Penelitian

Tujuan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Parameter	Sumber
Menentukan faktor-faktor dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun	Faktor Perekonomian	Perekonomian wilayah	Jumlah PAD	Daya dukung ekonomi wilayah adalah potensi sumberdaya dan ekonomi wilayah untuk mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk. Parameter yang digunakan adalah Pendapat Asli Daerah (PAD). Dimana tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Pusat Pertumbuhan (Studi Kasus: Kabupaten Bima, NTB) (Farizal, 2011) • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007
	Faktor Kependudukan	Jumlah penduduk Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk perkecamatan Luas wilayah perkecamatan	Penentuan Ordo Kota dengan rumus Zip'f Law. Penentuan jumlah penduduk didasarkan pada orde suatu kota, dimana untuk pusat pemerintahan harus memiliki orde lebih tinggi dibandingkan dengan orde kota yang berada dibawahnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 • Kajian Tentang Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten (Studi Kasus Kabupaten Bekasi – Cikarang) (Soenkarno,1999) • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007
	Faktor Potensi Daerah	Jumlah tenaga kerja Keragaman jenis lapangan pekerjaan	Jumlah tenaga kerja Jumlah dan jenis lapangan pekerjaan	Parameter yang digunakan dalam Jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang ada adalah dilihat dari jenis pekerjaan utama. Sebagai pusat pemerintahan akan lebih baik jika jenis lapangan pekerjaan yang utama dari sektor perdagangan dan jasa, maupun pelayanan umum.	
Faktor Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana Kepadatan sarana Daya tampung pelayanan sarana Daya tampung pelayanan prasarana	Jumlah sarana yang tersedia Jumlah penduduk yang terlayani Jumlah penduduk yang terlayani	DD $S_{pi} = (\sum S_{pi} \times JP) / SPP \text{ Mi}$ DD $S_{pi} > 1 =$ sarana prasarana mendukung jumlah penduduk	DD $S_{pi} = (\sum S_{pi} \times JP) / SPP \text{ Mi}$ DD $S_{pi} > 1 =$ sarana prasarana mendukung jumlah penduduk	

Tujuan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Parameter	Sumber
		Radius pelayanan prasarana	Total jarak setiap prasarana yang ada dipermukiman	Tingkat pelayanan=(Jumlah penduduk terlayani/jumlah keseluruhan)100%	
	Faktor Ketersediaan Lahan	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan Daya tampung wilayah	Luas guna lahan di setiap kecamatan	luas wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah luas kawasan lindung. Semakin banyak wilayah yang diperuntukkan untuk kawasan budidaya, maka akan semakin baik untuk menjadi ibukota kabupaten. $A=L/P$, jika A (daya dukung lahan)>konsumsi lahan (Standar Yeates), maka populasi penduduk melebihi daya dukung lingkungan	
	Faktor geografis	Resiko terhadap bencana	Frekuensi bencana yang terjadi Kawasan rawan bencana	Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan terhadap bencana	
	Faktor aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat	Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan Kelancaran aksesibilitas	Jarak total pusat kecamatan ke pusat pemerintahan	$A_{ij} = \frac{E_i}{d_{ij}^b}$ Jika A_{ij} semakin tinggi maka aksesibilitas semakin baik	
	Faktor kesesuaian dengan rencana tata ruang	Kesesuaian kebijakan pemerintah	Kebijakan RTRW, PP	Semakin banyak kebijakan yang diambil yang sesuai dengan perturan pemerintah yang ada maka semakin baik menjadi pusat pemerintahan	

Tujuan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Parameter	Sumber
Menilai faktor-faktor terpilih dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun yang ada pada pusat-pusat aktifitas SSWP	Faktor Perekonomian	Perekonomian wilayah	Jumlah PAD	Daya dukung ekonomi wilayah adalah potensi sumberdaya dan ekonomi wilayah untuk mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk. Parameter yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Pusat Pertumbuhan (Studi Kasus: Kabupaten Bima, NTB) (Farizal, 2011) • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007
	Faktor Kependudukan	Jumlah penduduk Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk perkecamatan Luas wilayah perkecamatan	Penentuan Ordo Kota dengan rumus Zip'f Law. Penentuan jumlah penduduk didasarkan pada orde suatu kota, dimana untuk pusat pemerintahan harus memiliki orde lebih tinggi dibandingkan dengan orde kota yang berada dibawahnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 • Kajian Tentang Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten (Studi Kasus Kabupaten Bekasi – Cikarang) (Soenkarno,1999) • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007)
	Faktor Potensi Daerah	Jumlah tenaga kerja Keragaman jenis lapangan pekerjaan	Jumlah tenaga kerja Jumlah dan jenis lapangan pekerjaan	Jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang ada adalah dilihat dari jenis pekerjaan utama. Sebagai pusat pemerintahan akan lebih baik jika jenis lapangan pekerjaan yang utama dari sektor perdagangan dan jasa, maupun pelayanan umum.	
Faktor Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana Kepadatan sarana Daya tampung pelayanan sarana Daya tampung pelayanan prasarana Radius pelayanan prasarana	Jumlah sarana yang tersedia	Jumlah sarana yang tersedia	$DD S_{pi} = (\sum S_{pi} \times JP) / SPP M_i$ $DD S_{pi} > 1 =$ sarana prasarana mendukung jumlah penduduk	
			Jumlah penduduk yang terlayani Total jarak setiap prasarana yang ada dipermukiman	$DD S_{pi} = (\sum S_{pi} \times JP) / SPP M_i$ $DD S_{pi} > 1 =$ sarana prasarana mendukung jumlah penduduk Tingkat pelayanan=(Jumlah penduduk terlayani/jumlah keseluruhan)100%	

Tujuan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Parameter	Sumber
	Faktor Ketersediaan Lahan	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan Daya tampung wilayah	Luas guna lahan di setiap kecamatan	luas wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah luas kawasan lindung. Semakin banyak wilayah yang diperuntukkan untuk kawasan budidaya, maka akan semakin baik untuk menjadi ibukota kabupaten. $A=L/P$, jika A (daya dukung lahan)>konsumsi lahan (Standar Yeates), maka populasi penduduk melebihi daya dukung lingkungan	
	Faktor geografis Faktor aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat	Resiko terhadap bencana Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan Kelancaran aksesibilitas	Frekuensi bencana yang terjadi Jarak total pusat kecamatan ke pusat pemerintahan	$A_{ij} = \frac{E_i}{d_{ij}^b}$ Jika A_{ij} semakin tinggi maka aksesibilitas semakin baik	
	Faktor kesesuaian dengan rencana tata ruang	Kesesuaian kebijakan pemerintah	Kebijakan RTRW, PP	Semakin banyak kebijakan yang diambil yang sesuai dengan perturan pemerintah yang ada maka semakin baik menjadi pusat pemerintahan	

3.3. Metode Penelitian

3.3.1. Metode Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan fakta yang sesuai dengan kenyataan di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan analisis, baik berupa data primer maupun data sekunder. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, dilakukan teknik-teknik pengumpulan data untuk mempermudah perolehan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Hasan, 2002). Berdasarkan caranya, maka pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi/pengamatan, dokumentasi, kuesioner/angket, dan wawancara/interview.

Untuk mendapatkan data primer maka dilakukan survei primer untuk mengetahui kondisi eksisting wilayah studi. Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data primer ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan/Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan empiris (Hasan, 2002). Metode pengamatan/observasi dilakukan dengan mengamati langsung obyek studi untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai kondisi eksisting obyek studi. Metode ini juga digunakan untuk menyelaraskan antara informasi yang diperoleh dari survei sekunder dengan kondisi di lapangan.

Metode observasi dilakukan untuk mengamati potensi dan permasalahan di wilayah studi penelitian yakni mengenai Kabupaten Madiun. Metode ini juga digunakan untuk menyelaraskan antara informasi yang diperoleh dari survei sekunder yakni dari data dokumen dan instansi terkait dengan kondisi nyata di lapangan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen (Hasan, 2002). Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, simbol, angka, maupun gambar

mengenai obyek studi. Dokumentasi wilayah studi ditampilkan dalam bentuk foto mapping yang dapat memberikan gambaran mengenai obyek studi yang diteliti.

3. Wawancara/Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dimana jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002). Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara berstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara (Hasan, 2002).

Pada penelitian ini, pewawancara melakukan wawancara terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah di urutkan untuk kemudian dikembangkan satu per satu untuk memperoleh informasi dan data yang lebih detail terkait dengan dilakukannya penelitian ini. Wawancara dalam studi ini dilakukan untuk mendapatkan kebijakan dan alasan yang terkait dengan pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Data sekunder disebut juga data tersedia yakni diperoleh dari perpustakaan, penelitian terdahulu maupun dari instansi. Data sekunder diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Studi Literatur/Pustaka

Studi literatur/pustaka dilakukan dengan mencari materi bahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dipergunakan dalam proses analisis. Materi tersebut dapat diperoleh dari laporan penelitian, pustaka (referensi buku), serta peraturan pemerintah. Adapun fungsi dari studi literatur/pustaka antara lain sebagai berikut (Hasan, 2002):

- a. Untuk mempertajam permasalahan, artinya dengan adanya studi kepustakaan, maka permasalahan yang dikemukakan akan semakin jelas arah dan bentuknya.
- b. Untuk mencari dukungan fakta, informasi atau teori-teori dalam menentukan landasan teori atau kerangka teori dalam penelitian.
- c. Untuk memperlancar penyelesaian penelitian.

2. Instansi

Survei instansi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dari instansi pemerintahan. Teknik ini dilakukan melalui pengumpulan data dari dinas/instansi terkait yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu: Bappeda, BPS, dan Dinas Pekerjaan Umum. Data-data tersebut dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan dengan kondisi eksisting di wilayah studi.

3.3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut *universe*. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti jumlahnya disebut populasi *infinite* atau tak terbatas, dan populasi yang jumlahnya diketahui dengan pasti (populasi yang dapat diberi nomor identifikasi) disebut populasi *finit*.

Suatu kelompok objek yang berkembang terus (melakukan proses sebagai akibat kehidupan atau suatu proses kejadian) adalah populasi *infinite*, sehingga populasi penelitian jumlah pegawai negeri sipil Kabupaten Madiun merupakan populasi *infinite*.

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian (sample sendiri secara harfiah berarti contoh). Berdasarkan hasil survei pendahuluan, jumlah pegawai negeri sipil tahun 2014 di Kabupaten Madiun sebesar 10.229 jiwa, sehingga ukuran sampel dari populasi dapat dihitung dengan rumus Slovin (1960) sebagai berikut;

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel)

Ukuran sampel yang diambil dalam penelitian dengan batas kesalahan yang diinginkan 10%, yaitu;

$$n = \frac{10.229}{1 + 10.229(0,1)^2} = \frac{10.229}{1 + 102,29} = \frac{10.229}{103,229} = 99,03 \approx 100 \text{ orang}$$

Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *judgment sampling* karena sampel dipilih berdasarkan penilaian bahwa responden adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Jadi, *judgment sampling* umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai “*information rich*”.

Dimana dalam pembagian kuisioner, dipilih tiga Badan Satuan Kerja Kabupaten Madiun dan 7 Dinas. Satuan kerja tersebut antara lain adalah Bappeda, Kesbang dan Ketahanan Pangan. Sedangkan untuk dinas adalah Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pengairan, Dinas Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan RSUD. Dari 100 kuisioner tersebut dibagi 10 kuisioner untuk setiap instansi. Dimana dalam penentuan responden memakai asumsi bahwa responden benar-benar mengetahui dan memahami tentang pemindahan Kabupaten Madiun.

3.3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan teknik atau cara peneliti untuk menganalisis data yang ada sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Metode analisis data yang digunakan adalah:

A. Analisis Daya Dukung Sarana Prasarana

Fasilitas umum dan fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas perdagangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan dan persebaran jumlah fasilitas dengan jumlah penduduk yang dilayani/ dalam menentukan layak tidaknya suatu fasilitas pada sebuah daerah dapat diketahui dengan rumus.

Analisis daya dukung pelayanan sarana prasarana permukiman digunakan untuk menilai kemampuan sarana prasarana yang ada di dalam lingkungan permukiman tertentu baik di perdesaan maupun perkotaan untuk mendukung penduduk yang ada. Dengan melihat jumlah penduduk, jumlah sarana prasarana eksisting dan standar pelayanan minimal untuk sarana prasarana maka dapat diketahui analisis daya dukung dari sarana prasarana yang ada.

Dengan menggunakan rumus dari daya dukung sarana prasarana sebagai berikut:

$$DDSPi = (\sum Spi \times JP) / SPPMi$$

Keterangan:

DDSPi = Daya dukung sarana dan prasarana jenis-i

Spi = Jumlah sarana dan prasarana jenis-i

JP = Jumlah Penduduk

SPPMi = Standar pelayanan sarana dan prasarana minimal atau jumlah penduduk pendukung minimal untuk jenis sarana prasarana-i

Analisis tingkat pelayanan jalan dapat diketahui dari indeks aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kemudahan bagi penggunaan jalan untuk mencapai suatu pusat kegiatan atau simpul-simpul kegiatan di dalam wilayah yang dilayani.

Dievaluasi dari keterhubungan antar pusat kegiatan oleh jalan dalam wilayah yang dilayani jalan dan diperhitungkan nilainya terhadap luas wilayah yang dilayani. Nilai indeks aksesibilitas dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{\text{Panjang jalan}}{\text{Luas wilayah}}$$

Analisis tingkat pelayanan prasarana yang lain seperti Air bersih, sanitasi, dan listrik dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani prasarana}}{\text{Jumlah penduduk keseluruhan}} \times 100\%$$

B. Analisis Daya Tampung Wilayah

Konsep daya tampung wilayah dapat menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Menurut Yeates (1980) daya dukung lahan dapat diidentifikasi dari daya tampung dan dihitung berdasarkan luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk existing dihitung dari kebutuhan lahan per kapita, dengan rumus sebagai berikut:

$$A = L/P$$

Keterangan:

A = daya dukung lahan

L = Luas lahan (ha)

P = Populasi penduduk

Apabila nilai dari daya dukung lahan (A) tersebut melebihi nilai konsumsi lahan yang ditentukan (Standar Yeates) maka dapat dikatakan populasi penduduk pada wilayah tersebut sudah melebihi daya dukung lingkungannya (di luar ambang batas). Nilai dari daya dukung lahan yang ditunjukkan dengan konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran populasi kota menurut Yeates (1980) dapat dilihat pada Tabel 4.40.

Tabel 3. 2. Konsumsi Lahan Perkapita

No.	Populasi Penduduk (jiwa)	Konsumsi Lahan (ha/jiwa)
1.	10.000	0,100
2.	25.000	0,091
3.	50.000	0,086
4.	100.000	0,076
5.	250.000	0,070
6.	500.000	0,066
7.	1.000.000	0,061
8.	2.000.000	0,057

Sumber: Yeates, 1980

C. Analisis Kependudukan

Metode menetapkan orde perkotaan dapat dibagi atas tiga kelompok. Kelompok I penentuan orde perkotaan hanya didasarkan pada jumlah penduduk, Kelompok II berdasarkan perbandingan banyaknya hubungan keluar, sedangkan kelompok III menggunakan unsur jumlah penduduk dan unsur lainnya seperti jumlah fasilitas kepentingan umum yang tersedia dan tingkat aksesibilitas kota terhadap kota lain terdekat yang lebih tinggi ordenya.

Rumus berikut ini dibuat oleh Auerbach dan Singer tetapi dipopulerkan oleh Zipf (Glasson, 1974), sehingga lebih dikenal dengan Metode Zipf. Rumusnya adalah

$$P_n = \frac{P_1}{n^q}$$

Keterangan:

P_n = Jumlah penduduk kota ranking ke-n

P_1 = Jumlah penduduk kota terbesar

n = Orde (ranking) kota tersebut

q = Sebuah pangkat

D. Analisis Ekonomi

Aspek ekonomi adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan indikator pembangunan wilayah. Di antara berbagai indikator ekonomi, indikator mengenai pendapatan masyarakat di suatu wilayah merupakan indikator yang terpenting. Salah satu pendapatan pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, perlu dipahami bahwa PAD yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapat masyarakat di suatu daerah (*regional income*). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapat masyarakatnya.

E. Analisis Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan mencapai suatu kota dari kota atau wilayah lain yang saling berdekatan. Untuk melihat tingkat aksesibilitas di pusat SSWP yang ada di Kabupaten Madiun, maka digunakan rumus gravitasi sebagai berikut:

$$A_{ij} = \frac{E_j}{d_{ij}^b}$$

Keterangan:

A_{ij} = Tingkat aksesibilitas dari kota i ke kota j

E_j = Total lapangan kerja di daerah j

d_{ij} = Jarak dari daerah i ke daerah j

b = Pangkat dari d (dalam banyak hal $b=2$)

F. Analisis Faktor

Analisis faktor adalah teknik yang digunakan untuk mengkombinasikan pertanyaan yang kemudian menghasilkan variabel baru. Tujuannya adalah untuk memahami gagasan/konsep pokok dari pertanyaan – pertanyaan, variabel-variabel, atau obyek-obyek dan menyatukannya dalam suatu variabel baru. Analisis ini juga menggambarkan tentang struktur data dari penelitian, artinya ingin diketahui susunan dan hubungan yang terjadi pada hubungan antar variabel dengan metode faktor.

Analisis faktor terdiri dari dua yaitu faktor eksploratori (*Exploratory Factor Analysis = EFA*) dan analisis faktor konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis = CFA*). Menurut Widarjono (2010: 240), analisis faktor eksploratori yaitu mencari sejumlah indikator untuk membentuk faktor umum (*common factor*) tanpa didasarkan landasan teori atau dengan kata lain analisis faktor eksploratori merupakan sebuah metode untuk membangun sebuah teori (*theory building*). Sedangkan analisis faktor konfirmatori digunakan untuk mencari sejumlah variabel indikator yang membentuk faktor umum didasarkan pada landasan teori yang ada atau dengan kata lain analisis faktor konfirmatori merupakan metode untuk membuktikan kebenaran teori.

Berdasarkan pengertian dari kedua jenis analisis faktor tersebut, maka penelitian mengenai Penentuan Faktor-Faktor Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun menggunakan analisis faktor eksploratori untuk memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun.

Dalam melakukan analisis faktor, keputusan pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis apakah data yang ada cukup memenuhi syarat dalam analisis faktor. Ukuran yang digunakan untuk syarat kecukupan data dalam penelitian ini yaitu KMO (*Kaiser-Meyer Olkin*). Adapun formula untuk menghitung KMO sebagai berikut (Widarjono, 2010:241):

$$KMO = \frac{\sum \sum_{i=j} r_{ij}^2}{\sum \sum r_{ij}^2 + \sum \sum a_{ij}^2}$$

Dimana: r_{ij} = Koefisien korelasi
 a_{ij} = Korelasi parsial

Tabel 3. 3 Ukuran KMO

Ukuran KMO	Rekomendasi
$\geq 0,90$	Sangat baik
0,80-0,89	Berguna
0,70-0,79	Biasa
0,60-0,69	Cukup
0,50-0,59	Buruk
$\leq 0,50$	Tidak diterima

Sumber: Widarjono, 2010

Setelah menghitung KMO, dilakukan juga perhitungan koefisien korelasi di dalam analisis faktor untuk indikator tertentu, dikenal dengan MSA. Adapun formulanya adalah sebagai berikut (Widarjono, 2010:242):

$$MSA = \frac{\sum r_{ij}^2}{\sum r_{ij}^2 + \sum a_{ij}^2}$$

Dimana: r_{ij} = Koefisien korelasi
 a_{ij} = Korelasi parsial

Setelah melakukan tahapan-tahapan analisis faktor hingga rotasi faktor, maka langkah selanjutnya adalah interpretasi faktor. Interpretasi faktor dapat dilakukan dengan mengelompokkan variable yang mempunyai *loading* tinggi ke dalam faktor tersebut. Teknik interpretasi data dari hasil analisis faktor dengan hasil temuan/observasi/wawancara, dan menghubungkan hasil analisis dengan teori-teori yang digunakan.

Adapun model analisis faktor dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$F_i = W_{i1} \cdot X_1 + W_{i2} \cdot X_2 + W_{i3} \cdot X_3 + \dots + W_{ik} \cdot X_k$$

Dimana :

F_i = estimasi skor faktor ke-i (i=1,2,3,...,i)

W_{ik} = Bobot/koefisien faktor

X_k = Variabel

K = Jumlah variabel

Variabel observasi yang digunakan dalam analisis faktor adalah:

Tabel 3. 4 Variabel dalam Analisis Faktor

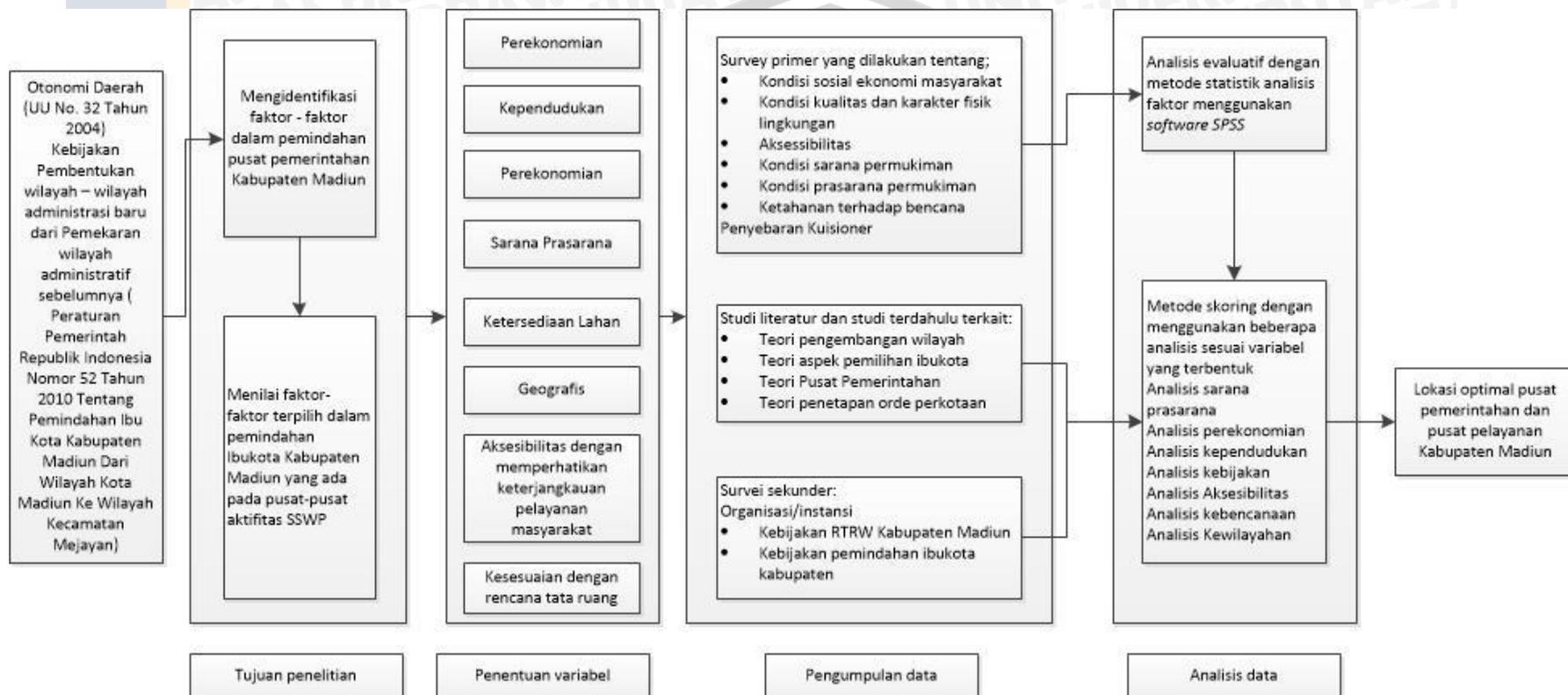
Variabel	Sub Variabel	Simbol
Faktor Perekonomian	Perekonomian wilayah	X1
Faktor sosial budaya dan sejarah	Jumlah penduduk	X2
	Kepadatan penduduk	X3
	Jumlah tenaga kerja	X4
	Keragaman jenis lapangan pekerjaan	X5
Faktor Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana	X6

	Kepadatan sarana	X7
	Daya tampung pelayanan sarana	X8
	Daya tampung pelayanan prasarana	X9
	Radius pelayanan prasarana	X10
Faktor Ketersediaan Lahan	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	X11
	Daya tampung wilayah	X12
Faktor geografis	Resiko terhadap bencana	X13
Faktor aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat	Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan	X14
	Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan	X15
	Kelancaran aksesibilitas	X16
Faktor kesesuaian dengan rencana tata ruang	Kesesuaian kebijakan pemerintah	X17

3.4. Alur Penelitian

Alur penelitian dimulai dari tujuan yang ingin dicapai peneliti, cara memperoleh data, dan analisis yang dilakukan sehingga diperoleh output penelitian, sampai kesimpulan dan sarana peneliti. Berikut merupakan diagram alur penelitian:





Gambar 3.1 Diagram Alir

3.5. Desain Survei

Desain survei merupakan tabulasi dari metodologi penelitian yang digunakan dengan pedoman dalam pengumpulan data lapangan, instansi atau literatur, sumber data, metode analisis data, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel berikut merupakan desain survei yang digunakan dalam penelitian:



Tabel 3. 5 Desain Survei

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis Data	Output
1.	Menentukan faktor-faktor dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun	Faktor Perekonomian	perekonomian wilayah	Jumlah PAD	Survei primer	Analisis evaluatif dengan metode statistik analisis faktor menggunakan <i>software SPSS</i>	Faktor faktor yang mempengaruhi pemindahan ibukota Kabupaten Madiun
		Faktor Kependudukan	Jumlah penduduk Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk perkecamatan Luas wilayah perkecamatan			
		Faktor Potensi Daerah	Jumlah tenaga kerja Keragaman jenis lapangan pekerjaan	Jumlah tenaga kerja Jumlah dan jenis lapangan pekerjaan			
		Faktor Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana Kepadatan sarana Daya tampung pelayanan sarana Daya tampung pelayanan prasarana Radius pelayanan prasarana	Jumlah sarana yang tersedia Jumlah penduduk yang terlayani Total jarak setiap prasarana yang ada dipermukiman			
		Faktor Ketersediaan Lahan	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan Daya tampung wilayah	Luas guna lahan di setiap kecamatan			
		Faktor geografis	Resiko terhadap bencana	Frekuensi bencana yang terjadi			
		Faktor aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat	Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan Kelancaran aksesibilitas	Jarak total pusat kecamatan ke pusat pemerintahan			

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis Data	Output
2.	Menilai faktor-faktor terpilih dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun yang ada pada pusat-pusat aktifitas 3 SSWP lainnya	Faktor kesesuaian dengan rencana tata ruang	Kesesuaian kebijakan pemerintah	Kebijakan RTRW, PP	a. Hasil dari analisis faktor b. RTRW Kab. Madiun, Madiun Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka	Analisis evaluatif	Lokasi optimal Ibukota Kabupaten Madiun berdasarkan nilai dari faktor yang terpilih
		Faktor Perekonomian	Perekonomian wilayah	Jumlah PAD			
		Faktor Kependudukan	Jumlah penduduk Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk perkecamatan Luas wilayah perkecamatan			
		Faktor Potensi Daerah	Jumlah tenaga kerja Keragaman jenis lapangan pekerjaan	Jumlah tenaga kerja Jumlah dan jenis lapangan pekerjaan			
		Faktor Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana Kepadatan sarana Daya tampung pelayanan sarana Daya tampung pelayanan prasarana Radius pelayanan prasarana	Jumlah sarana yang tersedia Jumlah penduduk yang terlayani Total jarak setiap prasarana yang ada dipermukiman			
		Faktor Ketersediaan Lahan	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan Daya tampung wilayah	Luas guna lahan di setiap kecamatan			
		Faktor geografis	Resiko terhadap bencana	Frekuensi bencana yang terjadi			
		Faktor aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat	Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan	Jarak total pusat kecamatan ke pusat pemerintahan			

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis Data	Output
		Faktor kesesuaian dengan rencana tata ruang	Kelancaran aksesibilitas Kesesuaian kebijakan pemerintah	Kebijakan RTRW, PP			



Gambar 3. 1 Diagram Alir.....	45
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian	32
Tabel 3. 2. Konsumsi Lahan Perkapita.....	40
Tabel 3. 3 Ukuran KMO.....	43
Tabel 3. 4 Variabel dalam Analisis Faktor.....	43
Tabel 3. 5 Desain Survei	47

Contents

3.1. Pendekatan Penelitian.....	30
3.1.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Variabel Penelitian	30
3.3. Metode Penelitian	36
3.3.1. Metode Pengumpulan Data	36
A. Data Primer.....	36
B. Data Sekunder	37
3.3.2. Populasi dan Sampel	38
3.3.3. Metode Analisis Data	39
A. Analisis Daya Dukung Sarana Prasarana.....	39
B. Analisis Daya Tampung Wilayah.....	40
C. Analisis Kependudukan	41
D. Analisis Ekonomi.....	41
E. Analisis Aksesibilitas.....	41
F. Analisis Faktor.....	42
3.4. Alur Penelitian.....	44
3.5. Desain Survei	46